

BAB II

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna. Tujuan dari suatu laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan seharusnya menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Sedangkan menurut Mursyidi (2010), laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis tentang kinerja dan posisi keuangan suatu lembaga/organisasi/ perusahaan dalam suatu periode tertentu. Ini menunjukkan bahwa laporan keuangan dapat dijadikan acuan untuk menilai kinerja lembaga yang menerbitkan laporan tersebut, dan kemampuan keuangan suatu organisasi/perusahaan. Informasi yang ada dalam laporan keuangan bersifat umum, tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai, namun informasi yang disajikan masih dalam kategori memadai untuk pengambilan kebijakan.

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas dan berguna bagi pemakainya apabila memenuhi beberapa karakteristik yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dapat dibandingkan. Berikut merupakan penjelasan mengenai karakteristik-karakteristik kualitatif tersebut menurut SAK revisi 1 Juni 2012 :

a. dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

b. relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aset yang dimiliki bermanfaat bagi pengguna ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (*confirmatory role*) terhadap prediksi yang lalu, misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan.

Informasi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pengguna, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan

keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya, nilai prediktif laporan laba rugi dapat ditingkatkan kalau pos-pos penghasilan atau beban yang tidak biasa, abnormal dan jarang terjadi diungkapkan secara terpisah.

c. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.

d. dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antarperusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan

dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antarperiode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pengguna harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari suatu periode ke periode dan dalam perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding.

Kebutuhan akan daya banding jangan dikacaukan dengan keseragaman semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam memperkenalkan standar akuntansi keuangan yang lebih baik. Perusahaan tidak perlu meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan karakteristik kualitatif relevansi dan keandalan. Perusahaan juga tidak perlu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi kalau ada alternatif lain yang lebih relevan dan lebih andal.

Menurut IAI, penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa lain dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria

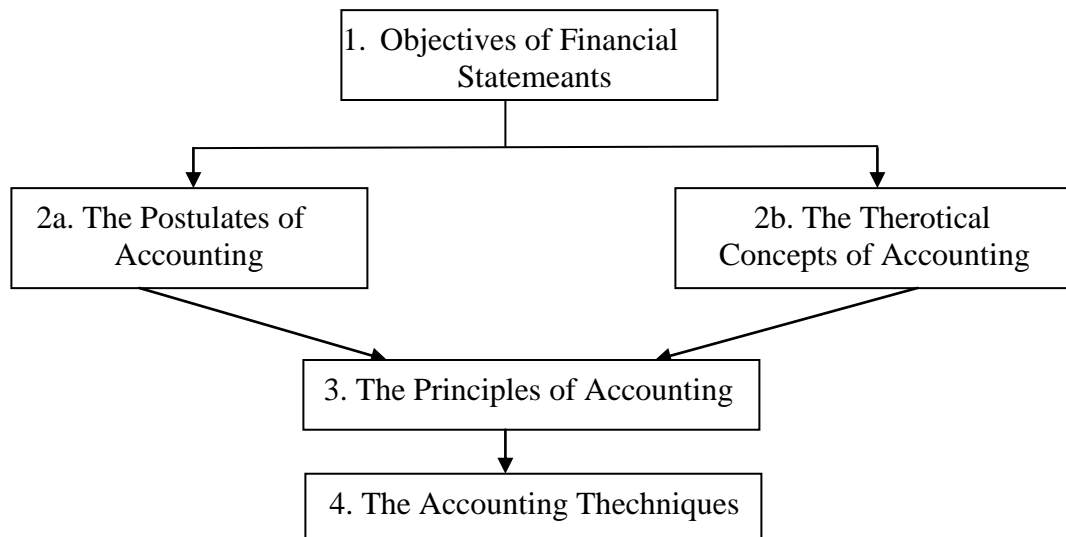
pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan. Perusahaan yang laporan keuangannya telah patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan membuat pernyataan secara terbuka (transparan) tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan. Suatu Perusahaan tidak boleh menyebutkan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan kecuali Laporan Keuangan tersebut telah patuh terhadap semua yang telah disyaratkan di dalam Standar Akuntansi Keuangan.

2.2. Struktur Teori Akuntansi

Dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan tentu saja harus mengikuti kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku secara umum di negaranya. Kaidah-kaidah akuntansi ini terkandung dalam sebuah struktur teori akuntansi. Menurut Tuanakotta (1984), dalam pendekatan deduktif terhadap teori akuntansi, kerangka penalaran logis harus cukup formal untuk memungkinkan diperolehnya kesepakatan tentang metode argumentatif yang dipergunakan atau untuk menemukan hal-hal di mana ketidakpastian mungkin terjadi. Kerangka ini juga berguna untuk menegaskan asumsi-asumsi yang telah disepakati yang melandasi pernyataan atau *propositions*, dan untuk memberikan indikasi mana proportion yang mendasar dan mana yang dapat diverifikasi secara empiris (ini berarti perlu adanya pembedaan antara *major proposition* dan *minor proposition*, dan pembedaan antara *premise* yang dapat diverifikasi dan yang tidak dapat diverifikasi). Apabila *premises* yang dipergunakan

itu relevan dan secara umum dapat dianggap benar atau dapat diturunkan secara logis dari *premise* yang lain, maka *principle* yang dihasilkan akan layak. Namun demikian ada kemungkinan bahwa kesulitan-kesulitan praktis dalam melaksanakan *principles* ini dapat menjadi kendala terhadap *basic principles*. Oleh karenanya, maka *accounting principles* dan kaidah-kaidah yang diturunkan dari *principles* tersebut mungkin harus dimodifikasi sehingga menjadi operasional.

Berikut ini merupakan suatu hierarki unsur-unsur dari struktur teori akuntansi sebagai berikut (Belkaoui, 2004) :



Ia selanjutnya memberikan definisi-definisi yang berikut :

1. *Accounting postulates* adalah pernyataan yang tidak perlu dibuktikan atau aksioma yang diterima secara umum karena sesuai dengan *objectives* daripada *financial statements*, dan menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosiologis, dan hukum dimana akuntansi harus beroperasi. Contoh : *entity postulate, going concern postulate, unit-of-measure postulate, accounting period postulate*.
2. *Theoretical concept* juga merupakan pernyataan yang tidak perlu dibuktikan atau aksioma yang diterima secara umum karena sesuai dengan *objectives* daripada *financial statements*, dan yang menggambarkan sifat dari *accounting entities* yang bergerak dalam perekonomian yang bebas yang ditandai oleh hak milik atas suatu kekayaan. Contoh : *proprietary theory, entity theory, fund theory*.
3. *Accounting principles* adalah aturan keputusan umum (*general decision rules*) yang diturunkan dari *objectives* dan *theoretical concepts*; *accounting principles* inilah yang mengatur pengembangan *accounting techniques*. Contoh : *cost principle, revenue principle, matching principle, objectivity principle, consistency principle, full disclosure principle, conservatism principle, materiality principle, uniformity and comparability principle*.

4. *Accounting techniques* adalah kaidah-kaidah khusus yang diturunkan dari *accounting principles* untuk menata suatu transaksi atau “*event*” tertentu yang dihadapi suatu *accounting entity*.

2.3. Konservatisme

Dari sekian banyak prinsip akuntansi, konservatisme merupakan salah satu prinsip yang perlu kita kupas lebih dalam. Selama ini, konservatisme selalu menjadi perbincangan. Nampaknya prinsip konservatisme cukup kontroversial khususnya di kalangan para akuntan di mana sebagian dari mereka beranggapan konservatisme merupakan prinsip yang wajib dianut dalam menyusun laporan keuangan supaya sifat manajemen yang pada umumnya terlalu optimis dalam menghadapi ketidakpastian dapat dikendalikan. Di sisi lain, ada juga yang beranggapan bahwa konservatisme merupakan prinsip yang dapat menimbulkan informasi yang bias dalam laporan keuangan karena laporan keuangan yang disusun atas dasar konservatisme akan menghasilkan penilaian yang *understated*.

2.3.1. Sejarah Konservatisme

Pencatatan historis dalam perdagangan antar persekutuan pada abad ke 15 di Eropa Tengah menunjukkan bahwa pencatatan akuntansi diabad tersebut telah menerapkan praktek konservatisme (Basu, 1997). Hellman (2007) menyatakan bahwa hingga saat ini, prinsip konservatisme masih menjadi prinsip yang paling berpengaruh pada praktek akuntansi konvensional. Prinsip ini mampu mencegah terjadinya kerugian akibat optimisme manajemen yang berlebihan yang mengakibatkan tingginya kecenderungan para manajer tersebut untuk meng-*overstate*

nilai aset bersih dan laba perusahaan. Para akuntan mempercayai bahwa dengan menggunakan metode penelitian yang menghasilkan nilai aset bersih dan laba terkecil, maka semakin kecil kemungkinan para pengguna laporan keuangan mengalami *mislead*. Kebutuhan para akuntan akan akuntansi konservatif berkaitan dengan dapat diandalkannya pelaporan keuangan yang menerapkan konservatisme. Sangat kecil kemungkinan akuntan dan auditor menghadapi tuntutan hukum dari pengguna laporan keuangan akibat laporan keuangan yang terlalu konservatif. (Khairina, 2009)

2.3.2. Definisi Konservatisme

Konservatisme dapat didefinisikan sebagai tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan yang mensyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui laba (*good news in earnings*) dibandingkan mengakui rugi (*bad news in earnings*) (Basu, 1997). Semakin tinggi tingkat perbedaan dalam verifikasi yang disyaratkan untuk pengakuan laba versus pengakuan rugi, maka semakin tinggi tingkat konservatisme akuntansinya (Watts, 2003a). Schroeder (2003) dalam Khirina (2009) menjelaskan konservatisme sebagai pilihan manajemen perusahaan ketika berada dalam keragu-raguan untuk menggunakan metode pencatatan yang memiliki kemungkinan terkecil untuk meng-*overstate* aset dan laba yang dilaporkan. Wolk dan Tearney (2000) menyebutkan bahwa konservatisme merupakan preferensi terhadap metode-metode akuntansi yang menghasilkan nilai paling rendah untuk aset dan pendapatan, sementara nilai paling tinggi untuk liabilitas dan biaya, atau menghasilkan nilai buku ekuitas yang paling rendah. Menurut Givoly dan Hayn

(2000), pelaporan konservatif dalam satu periode mengimplikasikan pelaporan nonkonservatif dalam beberapa periode berikutnya.

Akuntansi konservatif merupakan sikap yang diambil oleh akuntan dalam menghadapi dua atau lebih alternatif dalam penyusunan laporan keuangan. Apabila lebih dari satu alternatif tersedia maka sikap konservatif ini cenderung memilih alternatif yang tidak akan membuat aset dan pendapatan terlalu besar (Baridwan, 2002). Wolk *et.al*, (2000) mendefinisikan konservatisme akuntansi sebagai usaha untuk memilih metode akuntansi berterima umum yang (a) memperlambat pengakuan *revenues*, (b) mempercepat pengakuan *expenses*, (c) merendahkan penilaian aset, dan (d) meninggikan penilaian liabilitas. Konservatisme juga didefinisikan sebagai reaksi kehati-hatian (*prudent*) terhadap ketidakpastian, ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemberi pinjaman (*debtholders*) yang menentukan sebuah verifikasi standar yang lebih tinggi untuk mengakui *goodnews* daripada *badnews* (Lara *et al.*, 2005)

Beberapa faktor yang dianggap dapat mendorong pelaporan konservatif adalah masalah keagenan, biaya hukum, dan biaya politik. Masalah keagenan seringkali muncul dalam suatu perusahaan. Banyaknya pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam suatu perusahaan menjadi pemicu munculnya masalah keagenan. Setiap pemangku kepentingan memiliki maksud dan tujuannya masing-masing yang seringkali berbenturan satu sama lain. Sebagai contoh manajer ingin kinerja yang tergambar dalam laporan keuangan perusahaan tampak baik karena dengan demikian

manajer akan mendapatkan insentif atas kinerja baik yang dicapainya. Hal ini akan menimbulkan kecenderungan bagi manajer untuk menilai aset dan pendapatan perusahaan secara *overstated*. Penilaian secara *overstated* tentu saja akan menyesatkan para pengguna laporan keuangan seperti investor dan kreditor yang akan membuat keputusan ekonomi berdasarkan laporan keuangan tersebut. Dengan demikian konservatisme dianggap sebagai suatu solusi untuk meminimalkan masalah keagenan ini.

Faktor berikutnya adalah biaya hukum. Manajer akan menyeimbangkan biaya hukum yang akan timbul dengan manfaat yang diperoleh dari pelaporan keuangan dengan kebijakan akuntansi yang agresif. Perusahaan yang beroperasi pada wilayah dengan lingkungan hukum yang ketat akan cenderung menerapkan kebijakan akuntansi yang konservatif. (Khairina, 2009)

Faktor yang dapat mendorong pelaporan konservatif lainnya adalah biaya politik. Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa manajer memiliki kecenderungan untuk mengurangi nilai laporan laba untuk menghindari biaya politik yang besar. Widya (2004) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan, semakin besar perhatian pemerintah terhadapnya dan semakin besar kemungkinan untuk diatur. Dalam hal ini, perusahaan besar cenderung menjadi sorotan pemerintah dalam setiap undang-undang yang ditetapkannya.

Watts (2003a) menyatakan penerapan akuntansi konservatif dapat memberikan manfaat bagi perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Membatasi manajer dalam berperilaku oportunistik;

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi kepada investor tentang kinerja manajemen yang akan mempengaruhi keputusan investor dalam investasi dan keputusan dalam hal kesejahteraan manajemen. Kondisi tersebut dapat membuat manajemen mempengaruhi angka-angka dalam laporan keuangan untuk memaksimalkan kepentingannya. Prinsip konservatisme akuntansi dapat membatasi perilaku oportunistik dari manajemen.

2. Meningkatkan nilai perusahaan;

Konservatisme dapat meningkatkan nilai perusahaan karena akan membatasi *opportunistic payment* kepada manajer (dalam bentuk bonus) dan juga kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.

3. Mengurangi potensi tuntutan hukum (*litigation*);

Tuntutan hukum mendorong perkembangan konservatisme karena tuntutan hukum banyak muncul pada saat laba dan aset dicatat terlalu tinggi. Adanya potensi tuntutan hukum akibat pencatatan yang *overstatement*, membuat manajemen dan auditor terdorong untuk melaporkan laba dan aset yang konservatif.

4. Mentaati peraturan;

Peraturan yang dibuat oleh penyusun standar akuntansi juga memberikan insentif kepada perusahaan untuk menerapkan akuntansi konservatif seperti pengakuan secara *historical cost* ketika terjadi kenaikan harga sepanjang tahun, atau penerapan metode penilaian persediaan *comwill* pada kondisi harga yang fluktuatif.

2.4. IFRS

Beberapa tahun terakhir ini Indonesia sedang gencar untuk melakukan konvergensi terhadap IFRS. Tentu saja bukan merupakan proses yang mudah bagi Indonesia untuk melakukan perombakan standar yang selama ini telah digunakan menjadi mengacu kepada IFRS. Namun, bagaimanapun juga hal tersebut harus dilakukan, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar mempermudah mereka apabila ingin melakukan kerja sama dengan investor asing.

2.4.1. Pengertian IFRS

International Financial Reporting Standard atau IFRS adalah pedoman penyusunan laporan keuangan yang dapat diterima secara global. IFRS yang ada saat ini mengalami sejarah yang cukup panjang dalam proses terbentuknya. Mulai dari terbentuknya IASC / IAFB, IASB, hingga menjadi IFRS seperti yang ada saat ini. Jika sebuah negara menggunakan IFRS, berarti negara tersebut telah mengadopsi

sistem pelaporan keuangan yang berlaku secara global sehingga memungkinkan pasar dunia mengerti tentang laporan keuangan perusahaan di negara tersebut berasal.

Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Dalam perkembangannya, standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994.

Dengan mengadopsi IFRS, perusahaan-perusahaan di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya informasi dari laporan keuangan. Selain itu, pengadopsian IFRS diharapkan memberikan kemudahan dalam pemahaman laporan keuangan dengan menggunakan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang dikenal secara internasional, serta meningkatkan arus investasi global dan menurunkan biaya modal melalui pasar modal global. Indonesia sendiri memiliki tiga pilar standar akuntansi, yaitu standar akuntansi Indonesia, SAK-ETAP, dan standar akuntansi syariah. IFRS hanya diadopsi untuk standar akuntansi keuangan.

IFRS memiliki karakteristik, diantaranya :

1. IFRS menggunakan “*Principles Base* “ sehingga lebih menekankan pada interpretasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut.
2. Standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi.
3. Membutuhkan professional judgment pada penerapan standar akuntansi.
4. Menggunakan fair value dalam penilaian.
5. Mengharuskan pengungkapan (*disclosure*) yang lebih banyak.

FASB mengidentifikasi sejumlah perbedaan antara IFRS dan U.S. GAAP.

Perbedaan tersebut diklasifikasikan sebagai berikut (Doupnik dan Perera, 2007) :

1. Perbedaan definisi. Perbedaan dalam definisi muncul walaupun konsepnya sama. Perbedaan definisi ditujukan pada perbedaan pengakuan atau pengukuran.
2. Perbedaan pengakuan. Perbedaan kriteria pengakuan dan/atau petunjuk berhubungan dengan (1) apakah suatu item diakui atau tidak (2) bagaimana item tersebut diakui dan/atau (3) waktu pengakuan (perbedaan waktu)
3. Perbedaan pengukuran. Perbedaan dalam pendekatan untuk menentukan jumlah hasil pengakuan dari (1) perbedaan dalam metode yang diperlukan (2) perbedaan detail petunjuk dalam menerapkan metode yang sama.

4. Alternatif. Sebuah standar menyediakan pilihan antara dua atau lebih metode; sedangkan standar yang lain mengharuskan sebuah metode spesifik untuk digunakan.
5. Kurangnya syarat atau petunjuk. IFRS mungkin tidak mencakup isu dalam U.S. GAAP, begitu pula sebaliknya.
6. Perbedaan presentasi. Perbedaan presentasi item dalam laporan keuangan.
7. Perbedaan pengungkapan. Perbedaan informasi ditunjukkan dalam catatan atas laporan keuangan yang berhubungan dengan (1) apakah sebuah pengungkapan diharuskan atau tidak (2) kebiasaan dalam pengungkapan yang mana yang diharuskan untuk dibuat.

Dalam banyak kasus, IFRS lebih fleksibel daripada U.S. GAAP. IFRS secara umum mempunyai lebih sedikit garis haluan yang jelas daripada U.S. GAAP, lagi pula lebih banyak *judgement* yang diharuskan dalam menerapkan IFRS. IFRS dikatakan sebagai *principles-based accounting system (broad principles with limited detailed rules)* dan U.S. GAAP sebagai *rule-based system*. Namun, dalam beberapa kasus, IFRS lebih detail daripada U.S. GAAP. (Doupnik dan Perera, 2007)

Dewan penasihat IAI, Herwidayatmo menyatakan bahwa penerapan IFRS di Indonesia harus menggunakan skala prioritas, yaitu dengan mengutamakan perusahaan besar yang merupakan perusahaan terbuka. Menurutnya, untuk

perusahaan menengah dan kecil dengan skala lokal belum perlu menerapkan IFRS mengingat adanya alternative peraturan SAK-ETAP.

2.4.2. Konvergensi IFRS

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dalam hal-hal yang memengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan. Hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Setidaknya, terdapat tiga tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Tonggak sejarah pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku "Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)."

Kemudian, tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu, komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian mengkondifikasikannya dalam buku "Prinsip Akuntansi Indonesia 1984" dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha.

Berikutnya pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku "Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994." Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi,

kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Program adopsi penuh dalam rangka mencapai konvergensi dengan IFRS direncanakan dapat terlaksana dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam perkembangannya, standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan enam kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007. Buku "Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007" ini di dalamnya sudah bertambah dibandingkan revisi sebelumnya yaitu tambahan KDPPLK Syariah, 6 PSAK baru, dan 5 PSAK revisi. Secara garis besar, sekarang ini terdapat 2 KDPPLK, 62 PSAK, dan 7 ISAK.

Untuk dapat menghasilkan standar akuntansi keuangan yang baik, maka badan penyusunnya terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Awalnya, cikal bakal badan penyusun standar akuntansi adalah Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur dari GAAP dan GAAS yang dibentuk pada tahun 1973. Pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan. Komite PAI telah bertugas selama empat periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 hingga 1994 dengan susunan personel yang terus diperbarui. Selanjutnya, pada periode kepengurusan IAI tahun 1994-1998 nama Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK).

Kemudian, pada Kongres VIII IAI tanggal 23-24 September 1998 di Jakarta, Komite SAK diubah kembali menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dengan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK dan ISAK. Selain itu, juga telah dibentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) dan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK). Komite Akuntansi Syariah (KAS) dibentuk tanggal 18 Oktober 2005 untuk menopang kelancaran kegiatan penyusunan PSAK yang terkait dengan perlakuan akuntansi transaksi syariah yang dilakukan oleh DSAK. Sedangkan DKSAK yang anggotanya terdiri atas profesi akuntan dan luar profesi akuntan, yang mewakili para pengguna, merupakan mitra DSAK dalam merumuskan arah dan pengembangan SAK di Indonesia.

Kebutuhan akan akses informasi yang tidak terbatas dan intens termasuk dalam laporan keuangan merupakan konsekuensi yang harus dihadapi bidang akuntansi. Melihat akan kebutuhan ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagai organisasi yang berwenang dalam membuat standar akuntansi di Indonesia, memutuskan untuk melaksanakan program adaptasi dan harmonisasi standar akuntansi internasional IFRS. Pengadopsian penuh IFRS di Indonesia dimulai tahun 2012. Pengadopsian ini merubah kiblat standar akuntansi Indonesia yang semula mengacu pada *rule based* (berbasis aturan) menjadi *principal based* (berbasis prinsip).

Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tingkat pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi 5 tingkat:

1. *Full Adoption*; Suatu negara mengadopsi seluruh standar IFRS dan menerjemahkan IFRS sama persis ke dalam bahasa yang negara tersebut gunakan.

2. *Adopted*; Program konvergensi PSAK ke IFRS telah dicanangkan IAI pada Desember 2008. *Adopted* maksudnya adalah mengadopsi IFRS namun disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut.
3. *Piecemeal*; Suatu negara hanya mengadopsi sebagian besar nomor IFRS yaitu nomor standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja.
4. *Referenced (convergence)*; Sebagai referensi, standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar.
5. *Not adopted at all*; Suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.

Dalam melakukan konvergensi IFRS, terdapat dua macam strategi adopsi, yaitu *big bang strategy* dan *gradual strategy*. *Big bang strategy* mengadopsi penuh IFRS sekaligus, tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu. Strategi ini digunakan oleh negara -negara maju. Sedangkan pada *gradual strategy*, adopsi IFRS dilakukan secara bertahap. Strategi ini digunakan oleh negara – negara berkembang seperti Indonesia. Terdapat 3 tahapan dalam melakukan konvergensi IFRS di Indonesia, yaitu:

1. Tahap Adopsi (2008 – 2011), meliputi aktivitas dimana seluruh IFRS diadopsi ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, dan evaluasi terhadap PSAK yang berlaku.
2. Tahap Persiapan Akhir (2011), dalam tahap ini dilakukan penyelesaian terhadap persiapan infrastruktur yang diperlukan. Selanjutnya, dilakukan penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS.

3. Tahap Implementasi (2012), berhubungan dengan aktivitas penerapan PSAK IFRS secara bertahap. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap dampak penerapan PSAK secara komprehensif.

2.5. Konservatisme dan Konvergensi IFRS

Pada tahun 2012, perusahaan-perusahaan di Indonesia diwajibkan untuk menggunakan SAK yang telah mengadopsi IFRS secara penuh. Hal ini tentu saja membuat berbagai perubahan dalam penyusunan laporan keuangan. Pada tahun-tahun sebelumnya, Indonesia menggunakan SAK yang sebagian masih berkiblat pada *Generally Accepted Accounting Principles* atau GAAP di mana standar tersebut lebih menggunakan biaya historis dalam menilai aset maupun liabilitas perusahaan. Perusahaan cenderung untuk memilih nilai terendah yang dihasilkan oleh beberapa metode akuntansi, misalnya pada metode LCOM (*Lower of Cost Or Market*). Setelah diadopsinya IFRS, maka LCOM sudah tidak berlaku lagi. Metode yang sekarang dipakai adalah LCNRV (*Lower of Cost Or NRV*). Sebagai contoh, dalam suatu kondisi yang sama di mana cost persediaan nilainya Rp 1.000, NRV = Rp 980 dan *replacement cost* Rp 950. Pada metode LCOM persediaan akan mengambil nilai terendah antara *cost* atau *replacement cost*. Pada contoh tersebut, persediaan akan dicatat sebesar Rp 950 menurut LCOM. Pada metode LCNRV persediaan akan mengambil nilai terendah antara *cost* atau NRV. Pada contoh tersebut, persediaan akan dicatat sebesar Rp 980 menurut LCNRV. Dari contoh tersebut kita dapat melihat perbedaan tingkat konservatisme dari kedua metode tersebut. Pada metode LCOM akan dicatat rugi (*loss*) sebesar Rp 50 sedangkan pada metode LCNRV akan dicatat

rugi (*loss*) sebesar Rp 20. Laba perusahaan yang menggunakan metode LCOM tentu saja akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan metode LCNRV karena rugi (*loss*) yang ditimbulkan lebih besar ketika kita menggunakan metode LCOM dibandingkan metode LCNRV dalam suatu kondisi yang sama. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa SAK sebelum adopsi penuh pada IFRS lebih konservatif. Hal itu diperkuat dengan adanya LCOM *rule* yaitu *replacement cost* tidak lebih tinggi daripada NRV dan tidak lebih rendah dari NRV *minus markup*. Banyak kalangan yang menyatakan bahwa prinsip konservatisme akuntansi akan berkurang penerapannya atau bahkan tidak sama sekali diterapkan apalagi dengan istilah *prudence* yang dimunculkan oleh IASB.

Beberapa poin di bawah ini akan memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai semakin berkurangnya penekanan atas penggunaan akuntansi konservatif yang konsisten dalam IFRS (Khairina, 2009) :

a. Dalam kerangka konseptual IFRS yang dipublikasikan IASC (*International Accounting Standard Committee*) tahun 1989 dan diadopsi oleh IASB tahun 2001 penggunaan pelaporan keuangan dengan pendekatan laporan keuangan yang telah digunakan sejak lama dalam akuntansi konvensional digantikan dengan pendekatan neraca. Dalam pendekatan baru tersebut, penekanan prinsip akuntansi yang digunakan tidak lagi *matching cost against revenue*, namun penentuan, pengakuan dan pengukuran nilai aset serta liabilitas dengan tepat. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat, maka pendapatan (*revenue*) dapat dihitung berdasarkan

peningkatan nilai aset atau penurunan nilai liabilitas dan beban dapat dihitung berdasarkan penurunan nilai aset atau peningkatan nilai liabilitas. Pada kondisi diketahuinya nilai pasar dari aset dan liabilitas yang dimiliki perusahaan, maka pengukuran nilai aset dan liabilitas tersebut didasarkan pada nilai pasar. Dalam hal ini, IFRS mengeluarkan peraturan baru di tahun 2005 yang diaplikasikan untuk perusahaan-perusahaan publik di Swedia. Peraturan tersebut mempersyaratkan perusahaan untuk memperbarui pengukuran akun-akun di neraca berdasarkan nilai pasarnya di setiap laporan kuartalan (Swaard, Rosencratz dan Narayan (2005) dalam Khairina, 2009). Penerapan regulasi baru tersebut menyisakan sedikit ruang bagi praktek konservatisme di bawah standar IFRS (Hellman (2007) dalam Khairina, 2009).

b. IAS 11 (*Zero Profit Recognition for fixed-Price Contracts*)

Versi terbaru dari IAS 11 mulai berlaku sejak tahun 1995. Standar ini mengatur mengenai penggunaan metode POC (*Percentage of Completion*) untuk pengakuan atas pendapatan dan biaya dalam kontrak konstruksi sebagai pengganti dari metode CC (*Completed Contract*). Hellman (2007) menyatakan metode CC dinilai lebih konservatif dibandingkan metode POC karena metode CC dinilai keuntungan yang dapat diakui perusahaan akan mengalami *understatement* selama proses kontrak dan akan mengalami *overstatement* setelah kontrak selesai. Hal ini disebabkan, perusahaan hanya boleh mengakui pendapatan dari kontrak konstruksi tersebut setelah proses konstruksi selesai. Sementara, dalam metode POC, perusahaan

dapat mengakui pendapatan berdasarkan estimasi presentase penyelesaian kontrak pada tanggal neraca.

c. IAS 12 (*Deferred Tax Aset*)

IAS 12 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1998 mengatur mengenai pengakuan *deferred tax aset* pada neraca jika mungkin terdapat *future taxable profit*. Sebelum dikeluarkannya IAS 12 tersebut, *deferred tax aset* tidak diakui dalam neraca karena terdapat ketidakjelasan atas perolehan *taxable profit* di masa yang akan datang. Pemberlakuan efektif atas IAS 12 tersebut merepresentasikan perlakuan akuntansi yang kurang konservatif (Hellman, 2007)

d. IAS 16 (*Property, Plant and Equipment*)

IAS 16 mengatur bahwa dalam pengukuran nilai aset tetap, perusahaan dapat memilih penggunaan metode yang telah lama digunakan dalam akuntansi konvensional, sementara metode revaluasi yang mensyaratkan perusahaan untuk memperbarui nilai aset secara periodik atas nilai pasarnya dinyatakan sebagai metode yang kurang konservatif (Swaard, Rosencratz dan Narayan (2005) dalam Khairina, 2009). Dalam metode revaluasi ini, perusahaan dapat mengakui peningkatan nilai aset sebagai penambahan atas modal atau peningkatan nilai pendapatan jika penurunan nilai aset pada periode sebelumnya telah diakui sebagai biaya.

e. IAS 38 (*Capitalisation of Development Cost*)

IAS 38 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1998, kemudian diikuti dengan revisinya yang berlaku sejak tanggal 31 Maret 2004. Berdasarkan IAS 38, aset tidak berwujud yang berasal dari aktivitas pengembangan diakui sebagai aset jika telah

memenuhi beberapa syarat tertentu. Sebelum diberlakukannya standar ini, pembebanan langsung menjadi acuan utama dalam perlakuan akuntansi atas biaya pengembangan. Standar ini merepresentasikan regulasi akuntansi yang kurang konservatif.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian Hellman (2007) yang berjudul “*Accounting Conservatism Under IFRS*” menyatakan bahwa konservatisme digunakan sebagai prinsip akuntansi utama di negara-negara seperti Jerman dan Swedia dan konservatisme masih muncul menjadi sebuah konsep yang sering disarankan pada diskusi para praktisi yang berkaitan dengan metode akuntansi dalam suatu item tertentu atau kejadian khusus. Givoly dan Hayn (2000) memberi bukti bahwa praktik konservatisme telah dijalankan sejak tahun 1950-an, dan ada kecenderungan intensitasnya semakin meningkat sebelum diterapkannya IFRS. Zhang (2011) dan Gassen dan Sellhorn (2006) yang membuktikan bahwa konservatisme akuntansi meningkat setelah adanya adopsi IFRS di New Zealand dan Jerman. Di Indonesia, penelitian serupa dilakukan oleh Wardhani (2009). Namun penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa konvergensi GAAP lokal dengan IFRS pada suatu negara akan berpengaruh secara positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi.

2.7. Pengembangan Hipotesis

Sebelum adanya konvergensi IFRS, *historical cost* masih menjadi peran utama dalam melakukan pencatatan akuntansi oleh perusahaan. *Historical cost* merupakan

biaya yang telah terjadi di masa lalu yang digunakan sebagai dasar pencatatan perusahaan pada masa kini. Metode biaya atau *historical cost* ini dinilai sebagai metode yang konservatif karena pada prinsipnya perusahaan mengabaikan kemungkinan perubahan nilai dari suatu akun terutama yang bersifat menguntungkan bagi perusahaan (*gain*). Kemungkinan perubahan nilai tersebut diabaikan karena hal tersebut dianggap tidak dapat dijamin pasti terealisasi atau dengan kata lain masih mengandung unsur ketidakpastian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konservatisme merupakan dasar dari penggunaan metode *historical cost* karena antisipasinya terhadap ketidakpastian. Penggunaan *historical cost* membuat implementasi konservatisme bersifat mutlak dan konstan.

Di tengah gencarnya konvergensi IFRS di berbagai negara, peran konservatisme dalam penyusunan laporan keuangan tampaknya semakin tergeser. IFRS sebagai *principle based accounting system* lebih menggunakan *professional judgment* dalam melakukan penilaian suatu akun. Penggunaan *professional judgment* ini membuat optimisme dari sebuah perusahaan menjadi meningkat. Menurut Gray (1988) dalam Douplik dan Perera (2007), optimisme merupakan kebalikan dari konservatisme. *Professional judgment* membuat perusahaan menjadi lebih optimis karena perusahaan dapat mengakui perubahan nilai suatu akun sesuai dengan nilai wajar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perusahaan optimis bahwa perubahan nilai tersebut akan terealisasi. Menurut Radebaugh dan Gray (2001) dalam Douplik dan Perera (2007) *professional judgment* atau *professionalism* berhubungan negatif dengan ketidakpastian yang dihadapi perusahaan. Artinya, ketika perusahaan

menghadapi tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam kegiatan operasionalnya, maka perusahaan akan cenderung tidak optimis atau lebih konservatif. Dengan demikian dapat dikatakan konservatisme dalam IFRS hanya bersifat kondisional. Selain itu, konservatisme dianggap semakin tergeser ketika IASB memperkenalkan sebuah prinsip baru yaitu *prudence*. Walaupun konsep konservatisme telah digantikan dengan *prudence* namun konservatisme perlu dipertimbangan, karena pada intinya *prudence* juga merupakan konsep kehati-hatian yang di dalamnya masih terdapat unsur konservatisme. (Ardina, 2012) Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha : Tingkat konservatisme akuntansi laporan keuangan sebelum konvergensi IFRS lebih tinggi daripada sesudah konvergensi IFRS.